

## KOALISI PARTAI ISLAM DAN WACANA PEMBELAHAN SOSIAL DALAM SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA

Oleh :

Mohammad Fazrulzaman Azmi<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara system pemilihan presiden, pembelahan sosial dan identitas agama, dan pola partai Islam dalam membentuk koalisi pada pemilihan presiden. Kenapa identitas Islam tidak lagi menjadi saluran utama? Kemudian, bagaimana pengaruh pengaruh system electoral terhadap permasalahan ini? Pada prosesnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelusuran sebagai cara dalam menjelaskan fenomena penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa sistem Pemilihan Presiden Indonesia cenderung dikategorikan sebagai sistem majoritarian dengan menekankan pada perolehan suara lebih dari 50%. Konsekuensinya, pembelahan sosial menjadi menyempit sehingga partai politik cenderung berorientasi ke tengah atau bersifat pragmatis. Hal ini dapat dibuktikan dengan dinamika pola koalisi yang terbentuk pada Partai Islam. Mereka tidak membentuk suatu kesatuan untuk mempertegas identitas Islam atau pembelahan sosial sebagai suatu kekuatan besar, namun mereka mencoba memadukan unsur Nasionalis dan Religius dalam menominasikan kandidat.*

**Kata kunci:** Koalisi, Partai Islam, Pembelahan Sosial, Pilpres

### ABSTRACT

*This study explains the causal relationship between the presidential election system, social cleavages and religious identity, and the pattern of Islamic parties in forming coalitions in presidential elections. Why is Islamic identity no longer the main channel? How does the electoral system affect this problem? In the process, this research uses a qualitative approach by applying the tracing method to explain the research phenomenon. The research found that Indonesia's presidential election system tends to be categorized as a majoritarian system with an emphasis on gaining more than 50% of the vote. Consequently, social cleavages are narrowing so that political parties tend to be center-oriented or pragmatic. This can be proven by the dynamics of coalition patterns formed in Islamic parties. They do not form a unity to emphasize Islamic identity or social cleavage as a major power, but they try to combine nationalist and religious elements in nominating candidates.*

**Keywords:** Coalition, Islamic Party, Social Cleavages, Presidential Election

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik, Universitas Islam Internasional Indonesia, Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat, 16416, [mohammad.fazrulzaman@uiii.ac.id](mailto:mohammad.fazrulzaman@uiii.ac.id)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, The Royal Islamic Strategic Studies Centre mempublikasikan daftar sepuluh negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia menjadi yang pertama dengan jumlah 231,06 juta penduduk (86,7%) beragama Islam<sup>2</sup>. Akan tetapi dalam politik elektoral, partai sekuler atau nasionalis lebih sukses daripada partai Islam<sup>3</sup>. Hal ini tergambar pada Pemilihan Legislatif tahun 2019, tiga kursi terbanyak didapatkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Golongan Karya (Golkar)<sup>4</sup>. Begitu pun pada Pemilihan Legislatif tahun 2014, tiga kursi terbanyak didapatkan oleh PDIP, Golkar, dan Gerindra<sup>5</sup>. Fossati mengategorikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai Islam yang berhasil mendapatkan kursi pada kontestasi politik elektoral di Indonesia<sup>6</sup>. Secara electoral, kenapa identitas agama tidak menjadi media utama partai Islam di Indonesia? Padahal Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Kemudian, bagaimana isu ini dijelaskan dalam fenomena koalisi partai Islam pada Pilpres

2014 dan 2019? Karena data empiris menunjukkan bahwa seluruh partai Islam tidak pernah ada dalam koalisi yang sama secara konsisten.

Pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, pemilihan presiden di Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kemudian, pasca jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998, terjadi beberapa kali amandemen konstitusi (Undang Undang Dasar tahun 1945), salah satu hasilnya adalah pemilihan presiden secara langsung. Selain itu, untuk bisa mencalonkan kandidat dalam pemilihan presiden, partai politik di Indonesia harus memenuhi syarat presidential threshold dengan jumlah 20 persen dari jumlah kursi di parlemen atau 25 persen dari suara nasional. Apabila satu partai politik tidak memiliki jumlah tersebut, maka partai politik dapat berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mencapai angka presidential threshold. Regulasi ini membuat partai Islam kehilangan daya tawar dalam mengusung calon presiden, karena secara electoral, kursi dan perolehan suara partai sekuler lebih besar dibandingkan dengan partai Islam. Seperti halnya pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019, kandidat yang menjadi calon presiden seluruhnya berasal dari partai nasionalis.

<sup>2</sup> Kusnandar, V B., & Bayu, D J. (2021). 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/risc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia> (Diakses: 28 Desember 2022).

<sup>3</sup> Mujani, S., and Liddle, R W. (2009). "Muslim Indonesia's Secular Democracy", University of California Press, Vol. 49, No. 4, pp. 575-590.

<sup>4</sup> Farisa, F C., Wiwoho, L H. (2019). Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024. Tersedia di: <https://pemilu.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024> (Diakses: 28 Desember 2022).

<sup>5</sup> Wibowo, E A. (2014). Ini Perolehan Kursi Resmi Parpol Pemilu 2014. Tersedia di: <https://www.merdeka.com/politik/ini-perolehan-kursi-resmi-parpol-pemilu-2014.html> (Diakses: 28 Desember 2022).

<sup>6</sup> Fossati, D. (2019). "The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 31, No. 2, pp.119-148.

**Tabel 1 Koalisi Partai Politik pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019**

No	Pemilu 2014		Pemilu 2019	
	Partai Pengusung	Kandidat	Partai Pengusung	Kandidat
1	Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar (Koalisi Merah Putih)	Prabowo-Hatta	PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem (Koalisi Indonesia Kerja)	Jokowi-Ma'ruf
2	PDIP, PKB, Nasdem, Hanura (Koalisi Indonesia Hebat)	Jokowi-Jusuf Kalla	Gerindra, PAN, Demokrat, PKS (Koalisi Indonesia Adil Makmur)	Prabowo-Sandi

Sumber: diproses oleh penulis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022

**Keterangan:**

1. Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra, pada Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa yang merupakan Ketua Umum PAN, sedangkan pada Pilpres 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra (Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2018).
2. Joko Widodo (Jokowi) adalah kader PDIP sebelumnya menjabat Gubernur DKI Jakarta (2012-2014), pada Pilpres 2014 berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009) dan berafiliasi dengan Partai Golkar, sedangkan pada Pilpres 2019 Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berafiliasi dengan PKB.
3. Prabowo dan Jokowi menggambarkan pengaruh partai sekuler atau nasionalis yang lebih mendominasi politik elektoral di Indonesia.

Dominasi partai sekuler di tengah mayoritas Muslim terbesar di dunia menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, asumsi yang umumnya muncul jika berhadapan dengan situasi tersebut adalah partai Islam yang seharusnya mendominasi politik di Indonesia. Akan tetapi, partai Islam tidak menjadi saluran politik bagi

Muslim di Indonesia pada umumnya. Selain itu pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, partai Islam yang memiliki kursi di parlemen tidak berkoalisi untuk mendukung calon presiden dari partai Islam. Kondisi ini menggambarkan dinamika politik Islam di Indonesia yang dinamis. Kekuatan politik Islam di Indonesia bukan berarti lemah, adanya Hatta Rajasa dan Ma'ruf Amin menggambarkan masih adanya daya tawar dari partai Islam dalam konteks politik elektoral.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan identitas agama yang tidak lagi menjadi media utama bagi partai Islam dalam kontestasi politik. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan hubungan kausal antara system electoral, pembelahan sosial dan identitas agama, dan pola partai Islam dalam membentuk koalisi pada pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019. Partai Islam yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada PPP, PKB, PAN, dan PKS.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga dalam proses pengumpulan dan interpretasi data melibatkan peneliti sebagai pemeran utama dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Sebagaimana, Corbin dan Strauss menjelaskan bahwa penelitian kualitatif melibatkan peneliti dalam proses

pengumpulan dan interpretasi data<sup>7</sup>. Karena itu, untuk membangun analisis yang lebih mendalam, maka penelitian ini menggunakan *process tracing* untuk mendalami peristiwa yang telah terjadi dan menghasilkan argumentasi kausal melalui interpretasi makna yang berkualitas. Beach dan Pederson menekankan bahwa argumentasi kausal atau *causal mechanism* lebih dari sekedar mendeskripsikan fenomena empiris, namun menjelaskan *cause and effect*<sup>8</sup>. Kemudian, penelitian ini tidak mengkaji seluruh peristiwa pemilihan presiden secara langsung di Indonesia, namun dibatasi pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019. Sumber data penelitian ini berdasarkan pada peristiwa empiris yang telah terjadi dan terdokumentasi pada data sekunder yang dihimpun dari media massa dan artikel ilmiah. Pada konteks ini data dianalisis dan diinterpretasikan ke dalam teks naratif, kemudian divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi.

## PEMBAHASAN

Demokrasi dan politik di Indonesia diwarnai dengan dua ciri aliran dan pembelahan sosial, yaitu Nasionalis dan Islam. Meskipun kondisi ini berbeda dengan demokrasi Indonesia tahun 1950an yang memiliki lebih banyak aliran atau pembelahan sosial karena dimasa itu aliran politik secara sosial lebih mengakar di masyarakat<sup>9</sup>. Pembelahan sosial sempat menurun karena kebijakan Orde Baru melalui fusi partai politik. Kemudian, politik aliran dan pembelahan sosial

kembali bangkit pasca Orde Baru, dilihat dari bertambahnya partai politik peserta Pemilu tahun 1999 (dari yang sebelumnya hanya tiga partai), dan arah perjuangan partai yang identik dengan aliran politik tertentu, seperti partai politik yang berasaskan Islam yaitu Partai Keadilan (sekarang menjadi PKS), dan PPP.

Di sisi lain, Indonesia berhasil membangun demokrasi dengan Pemilu yang bebas, adil, dan damai. Akan tetapi, bukan berarti demokrasi pasca reformasi tanpa catatan perbaikan. Penelitian sebelumnya, menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia melemah karena adanya kompromi dengan politisi korup dan pemimpin agama yang intoleran, selain itu lingkaran presiden bukan orang-orang yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi<sup>10</sup>. Kemudian, fungsi dasar demokrasi di Indonesia juga melemah karena kurangnya subsidi negara untuk partai politik, sehingga lembaga legislative dan eksekutif menjadi pendapatan alternatif bagi partai politik.<sup>11</sup>

Partai sekuler mendominasi kontestasi politik di Indonesia, seperti halnya pada Pemilu Legislatif tahun 2004 dan 2009, partai sekuler lebih mendominasi kursi parlemen, kemudian pada Pemilihan Presiden tahun 2009, enam calon presiden berasal dari partai sekuler<sup>12</sup>. Eksistensi partai Islam dalam politik electoral di Indonesia seakan kontra diktif dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kinerja partai Islam di Indonesia kurang baik karena Islam bukan menjadi *variable* yang cukup untuk membentuk afiliasi

<sup>7</sup> Corbin, J., and Strauss, A. (2014). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 4 ed. 2014. London: Sage Publication.

<sup>8</sup> Beach, Derek, and Pedersen, Rasmus Brun. (2013). *Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines*. the University of Michigan Press: Michigan.

<sup>9</sup> Ufen, A. (2008). "From "aliran" to dealignment: political parties in post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 16, No. 1, pp. 5-41.

<sup>10</sup> Bland, B. (2019). *Politics in Indonesia: Resilient Elections, Defective Democracy*. Sydney: Lowy Institute for International Policy.

<sup>11</sup> Mietzner, M. (2007). "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29, No. 2, pp. 238-263.

<sup>12</sup> Mujani, S., and Liddle, R W. (2009). "Muslim Indonesia's Secular Democracy", *University of California Press*, Vol. 49, No. 4, pp. 575-590.

politik<sup>13</sup>. Dengan demikian, partai Islam bukan menjadi cara utama bagi Muslim di Indonesia dalam menyalurkan aspirasi politik.

Persoalan lainnya adalah kurang kuatnya interaksi antara para pemilih, organisasi masyarakat Islam, dan partai Islam, sehingga partai Islam di Indonesia menjadi lemah dalam politik electoral<sup>14</sup>. Pemilih merupakan bagian penting dalam politik electoral, karena pemilih dalam demokrasi adalah pemegang kedaulatan yang suaranya diperebutkan oleh partai politik. Kemudian, organisasi masyarakat Islam merupakan bagian dari kebebasan berserikat dalam demokrasi. Seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang beranggotakan jutaan orang. Berdasarkan survey tahun 2021, 60% populasi di Indonesia terafiliasi dan berorientasi pada NU, lalu 6-7% terafiliasi pada Muhammadiyah<sup>15</sup>. Pemilih dan organisasi masyarakat keduanya merupakan bagian penting dalam politik electoral, dengan dukungan mayoritas pemilih dan organisasi masyarakat, partai politik dapat memenangkan Pemilu dan mengelola konflik kepentingan di antara masyarakat, sehingga dapat mewujudkan stabilitas politik dan pemerintahan.

Selain itu, umat Islam di Indonesia lebih tertarik pada isu ekonomi dan desentralisasi karena nilai-nilai Islam dapat lebih mengakar di tingkat local<sup>16</sup>. Akan tetapi, hal ini bukan berarti umat Islam di Indonesia tidak berpolitik, Meitzner dan Muhtadi menjelaskan bahwa seperempat umat Islam di Indonesia mendukung agenda social politik Islam<sup>17</sup>. Melemahnya pengaruh partai Islam di Indonesia bukan berarti

kemunduran politik Islam, akan tetapi Islam telah melampaui partai sekuler, kuatnya pengaruh agama dalam politik Indonesia terlihat dari peningkatan peraturan daerah berbasis Syariah, meskipun badan legislative daerah didominasi oleh partai sekuler<sup>18</sup>. Dengan demikian, politik Islam sejatinya memainkan peranan strategis dalam demokrasi Indonesia, sehingga Islam senantiasa mendapatkan tempat dalam politik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita mendapatkan banyak penjelasan soal mengapa Islam bukan menjadi saluran utama bagi partai politik. Mulai dari transformasi politik Islam yang telah melampaui partai Islam, kelemahan partai Islam dalam membangun kedekatan dengan pemilih Muslim, serta orientasi masyarakat yang tidak bergantung pada isu politik Islam. Beberapa faktor tersebut menjelaskan isu Islam tidak hanya menjadi bagian dari partai Islam namun juga bagian dari partai nasionalis. Hal ini mengindikasikan bahwa baik partai Islam maupun partai nasionalis telah berorientasi menjadi semakin memusat atau ketengah. Pada konteks ini, perbedaan dengan penelitian lainnya, penelitian ini menggunakan variabel sistem pemilu dan kajian koalisi partai politik untuk menjelaskan orientasi partai Islam yang cenderung mengarah ke tengah dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Epley, J., and Jung, E. (2016). "Vertically Disconnected: The Politics of Islam in Democratic Indonesia", *Asian Journal of Social Science*, Vol. 44, No. 1/2, pp. 54-77.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Data didapatkan dari perkuliahan Bersama Greg Fealy tahun 2022 di UIII

<sup>16</sup> Fossati, D. (2019). "The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 31, No. 2, pp.119-148.

<sup>17</sup> Meitzner, M., and Muhtadi, B. (2018). "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation", *Asian Studies Review*, 9 July 2018, 1-19.

<sup>18</sup> Yanuwidjaja (2010) menjelaskan bahwa

## Pemilihan Presiden dan Perbedaan Jalan Koalisi Partai Islam di Indonesia

Sistem pemilihan presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur pada Pasal 416, yaitu "*Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.*" Ketentuan lebih dari lima puluh persen menggambarkan bahwa kandidat harus mendapatkan suara mayoritas, sehingga sistem ini dapat dikategorikan sebagai sistem majoritarian.

Secara teoritis, pembelahan sosial lebih cenderung tidak terjadi pada system majoritarian, sehingga pengaruh struktur sosial dan identitas partai terhadap perilaku memilih lebih lemah<sup>19</sup>. Karena itu, isu pemanfaatan identitas cenderung muncul pada system proportional, karena partai atau kandidat berusaha untuk memperkuat ikatan mereka dengan pendukung intinya (kelompok homogen) dan memperluas dukungannya pada kelompok heterogen. Pada sistem majoritarian, partai politik cenderung mengarah ke tengah untuk mendapatkan suara masyarakat. Setiap partai dan kandidat didorong untuk mengadopsi insentif sentripetal dengan mengadvokasi *centrist policies*<sup>20</sup>.

Pada kasus Indonesia, kebijakan menengah ini tidak terlalu berpihak pada Islam maupun Nasional, sehingga seluruh partai cenderung mengkombinasikan keduanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan koalisi partai Islam yang juga beraliansi dengan partai nasionalis untuk menominasikan kandidat.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2009, keempat partai Islam dalam parlemen PPP, PKB, PAN, dan PKS ada dalam satu koalisi mengusung kandidat petahana, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Akan tetapi, pada Pemilihan Presiden tahun 2014, PKB bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang beranggotakan PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura untuk mengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sedangkan, PPP, PAN, dan PKS bergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).

PKB memiliki keputusan yang berbeda dengan partai Islam lainnya pada Pemilihan Presiden tahun 2014. Penyebab PKB bergabung dengan koalisi PDIP adalah visi dan misi yang dimiliki PDIP-P yang mengusung nilai-nilai NKRI dan tidak bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah.<sup>21</sup> Selain itu, Abdul Aziz Mansyur, Ketua Dewan Syuro PKB menjelaskan alasan lain bahwa poros koalisi lainnya diisi oleh kelompok yang kerap "mencuri" masjid, mengkafirkan dan membida'ahkan tahlilan dan ziarah kubur<sup>22</sup>. Hal yang menarik lainnya adalah koalisi PDIP

<sup>19</sup> Norris, Pippa. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Electoral Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, pp 100 dan 150.

<sup>20</sup> Cox, Gary W. (1990). *Centripetal and Centrifugal Incentives in Electoral Systems*, *Midwest Political Science Association*, 34(4), 903-935.

<sup>21</sup> Al Ayyubi, S., & Zuhri, S. (2014). *Pilpres 2014: Alasan PKB Koalisi dengan PDIP & Nasdem Usung Jokowi*. Tersedia di: <https://kabar24.bisnis.com/read/20140510/355/226692/pilpres-2014-alasan-pkb-koalisi-dengan-pdip-nasdem-usung-jokowi> (Diakses: 28 Desember 2022); Purnomo, W A., & Susanto, E. (2014). *Kenapa PKB Ngotot Ajukan Muhaimin Jadi Cawapres Jokowi?*. Tersedia di: <https://pemilu.tempo.co/amp/570685/kenapa-pkb-ngotot-ajukan-muhaimin-jadi-cawapres-jokowi> (Diakses: 28 Desember 2022).

<sup>22</sup> Fiansyah, R. (2014). *PAN Resmi Dukung Prabowo sebagai Capres*. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/1506461/PAN.Resmi.Dukung.Prabowo.sebagai.Capres> (Diakses: 28 Desember 2022).

dianggap sebagai langkah untuk menyematkan akidah Ahlul-sunnah wal Jamaah.

Secara ideologis, dalam konstitusi PKB tidak tertulis berasaskan Islam, seperti halnya PKS dan PPP. PKB merupakan partai yang dikategorikan sebagai partai Islam-inclusive yang basis pemilihnya adalah masyarakat yang terafiliasi dengan NU<sup>23</sup>. Secara kultural, tradisi beragama NU cenderung lebih tradisional, berbeda dengan Muhammadiyah yang cenderung moderat. Akan tetapi, dalam praktik politik PKB lebih terbuka berkoalisi dengan partai sekuler atau nasionalis, seperti PDIP dibandingkan dengan partai Islam lainnya, seperti PKS misalnya. Pernyataan Abdul Aziz Mansur menguatkan posisi PKB yang lebih tradisional dan menegaskan bahwa kondisi akar rumput PKB berbeda dengan yang dimiliki oleh PKS maupun PAN, khususnya kelompok menentang tradisi NU.

Selain itu, PKB juga mewacanakan kandidat yang lebih mungkin diakomodir oleh koalisi PDIP. PKB pun mewacanakan Rhoma Irama, dan Mahfud MD sebagai kandidat calon presiden, lalu mengajukan nama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai kandidat calon wakil presiden<sup>24</sup>. Kemudian, PKB juga mewacanakan Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden, khususnya bagi kelompok PKB Indonesia Timur<sup>25</sup>. Akan tetapi, semua usulan tersebut bergantung pada daya tawar PKB dalam koalisi. PKB menyadari bahwa daya tawar dalam koalisi ditentukan berdasarkan perolehan suara di parlemen atau jumlah kursi di DPR. Hal ini selaras dengan pen-

dapat Caplow bahwa kekuatan partai di parlemen dapat menentukan daya tawar dalam koalisi. Posisi tawar PKB lebih kecil dibandingkan dengan PDIP yang memiliki 109 kursi di parlemen<sup>26</sup>. Dengan demikian, PKB lebih banyak mengikuti keputusan PDIP dalam koalisi.

Meskipun PKB gagal dalam mencalonkan Cak Imin sebagai calon wakil presiden, namun PKB mendapatkan posisi tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja tahun 2014-2019. Posisi PKB dalam konteks ini lebih kuat dibandingkan dengan Nasdem dan Hanura. Kepentingan PKB dalam koalisi juga dikuatkan dengan posisi Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, karena sebelumnya JK merupakan salah satu kandidat yang dipromosikan oleh PKB sebagai calon presiden.

Pada poros Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar, terdapat tiga partai Islam, PAN, PKS, dan PPP. PAN berada di posisi nomor tiga dalam koalisi, kemudian diikuti oleh PKS, dan selanjutnya PPP. Koalisi ini gagal memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2014. PAN memutuskan untuk bergabung dengan Gerindra karena kesamaan *platform* politik, khususnya dalam mengatasi persoalan negara<sup>27</sup>. Pada koalisi ini, PAN lebih memiliki momentum dibandingkan dengan partai Islam lainnya, meskipun secara kursi parlemen, Golkar lebih mendominasi koalisi. Kesempatan PAN muncul karena PAN lebih mendominasi kursi parlemen dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Kemudian, Hatta Rajasa dinilai memiliki potensi untuk

<sup>23</sup> Baswedan, A R. (2004). Political Islam in Indonesia: Present and Future Trends, *Asian Survey*, vol. XLIV, no. 5, pp. 669-690.

<sup>24</sup> Purnomo, W A., & Susanto, E. (2014). Kenapa PKB Ngotot Ajukan Muhaimin Jadi Cawapres Jokowi?. Tersedia di: <https://pemilu.tempo.co/amp/570685/kenapa-pkb-ngotot-ajukan-muhaimin-jadi-cawapres-jokowi> (Diakses: 28 Desember 2022).

<sup>25</sup> Sumedi, D P., & Kurniawati, E. (2014). Kaukus PKB Batal Usung Jusuf Kalla Menjadi Capres. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/570912/kaukus-pkb-batal-usung-jusuf-kalla-menjadi-capres> (Diakses: 28 Desember 2022).

<sup>26</sup> lihat Caplow, T. (1956). "A Theory of Coalitions in the Triad", *American Sociological Review*, Vol. 21, No. 4, pp. 489-493.

<sup>27</sup> Fiansyah, R. (2014). PAN Resmi Dukung Prabowo sebagai Capres. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/1506461/PAN.Resmi.Dukung.Prabowo.sebagai.Capres> (Diakses: 28 Desember 2022).

dicalonkan sebagai wakil presiden. Ia pernah memegang berbagai jabatan di legislatif dan eksekutif, kemudian saat itu ia juga merupakan Ketua Umum PAN, sehingga memiliki pengaruh di partai tersebut. Selain itu, ia juga memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Republik Indonesia ke 5, Susilo Bambang Yudhoyono. Perolehan kursi PAN dan ketokohan Hatta Rajasa mempengaruhi posisinya dalam koalisi. Meskipun PAN tidak bisa menyaingi Gerindra karena faktor kekuatan parlemen dan elektabilitas kandidat yang lebih besar, namun PAN dapat memainkan peran lebih baik dibandingkan Golkar dan partai Islam lainnya di koalisis tersebut.

Berbeda halnya dengan PAN, PPP mengalami banyak persoalan internal untuk bisa secara resmi bergabung dalam koalisi Gerindra. Konflik internal terjadi di antara petinggi partai. Suryadharma Ali, yang saat itu Ketua Umum PPP memutuskan untuk mendukung Prabowo.

Sedangkan wakilnya, Suharso Monoarfa dan Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuzy yang didukung oleh Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden RI melakukan pergerakan untuk mendukung Jokowi<sup>28</sup>. Kekuatan politik paling kecil dalam Koalisi Merah Putih adalah PPP, baik dari jumlah kursi maupun pengaturan agenda. Setelah berdinamika, akhirnya PPP memutuskan untuk mendukung Prabowo. Situasi politik ini lah yang menyebabkan posisi politik PPP dalam koalisi menjadi semakin lemah, sehingga PPP tidak bisa mengajukan kandidat alternatif untuk mengisi posisi calon wakil presiden.

Sedangkan PKS, sebelumnya pernah menetapkan tiga kandidat unggulan dari internal partai, mereka adalah Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, dan Ahmad Heryawan. Akan tetapi, pengaruh politik PKS dalam koalisi tidak lebih kuat dari PAN, sehingga

PKS tidak bisa menempatkan kadernya dalam posisi wakil presiden. Sebelumnya, PKS melakukan komunikasi pra koalisi dengan berbagai partai, baik kepada Demokrat, PDIP, Golkar dan Gerindra.

PAN, PPP, dan PKS tidak menonjolkan basis massa Islam yang mereka miliki untuk menguatkan posisi mereka dihadapan Gerindra dan Golkar. Tidak seperti PKB yang selalu menarasikan terafiliasi dengan NU dan kader-kadernya adalah akar rumput dari anggota NU. Akan tetapi, Hatta Rajasa dan PAN dapat lebih memanfaatkan momentum, sehingga bisa menempati posisi calon wakil presiden dalam koalisi. Meskipun pada umumnya stigma terhadap PAN juga berkaitan dengan kadernya yang terafiliasi dengan Muhammadiyah.

Berdasarkan dinamika politik dan pola yang terbentuk pada pemilihan presiden tahun 2014, semua partai Islam dalam konteks ini memainkan pengaruh untuk mendapatkan peran strategis dalam koalisi. Namun yang perlu digaris bawahi adalah nihilnya wacana koalisi partai Islam. Selain itu, dalam berkoalisi pun wacana yang muncul cenderung ada di tengah, tidak menonjolkan salah satu sisi pembelahan sosial. Dengan demikian, pada pemilihan presiden 2014 terbukti bahwa pembelahan sosial tidak menjadi isu utama bagi partai Islam.

Selanjutnya, pada Pemilihan Presiden tahun 2019, perbedaan koalisi hanya ada pada PPP yang memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang dipimpin oleh PDIP. PPP dan PKB ada dalam satu koalisi mendukung Jokowi-Ma'ruf. PPP yang sebelumnya mendukung Prabowo berubah orientasi dengan mendukung kandidat petahana. Hal ini berkaitan dengan melemahnya pengaruh Suryadharma Ali, yang terjerat kasus korupsi dana haji sehingga ia dihukum 6

<sup>28</sup> Asril, S. (2014). PPP Resmi Dukung Prabowo pada Pilpres. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/12/0218266/PPP.Resmi.Dukung.Prabowo.pada.Pilpres> (Diakses: 28 Desember 2022).

tahun penjara<sup>29</sup>. Suryadharma pun mundur dari jabatan Ketua Umum kemudian digantikan oleh Romahurmuzy. Proses pergantiannya pun diwarnai dengan konflik internal dan munculnya dualisme kepemimpinan antara Romahurmuzy dan Djan Faridz. Adanya konflik internal dan kasus korupsi membuat pengaruh PPP kian melemah dihadapan koalisi.

Bergabungnya PPP dalam Koalisi Indonesia Kerja dapat menguatkan posisi PKB sebagai *leading sector* basis massa Islam di dalam koalisi. Posisi Jokowi sebagai petahana memiliki daya tawar tinggi untuk memilih calon wakil presidennya sendiri, sebagaimana kasus periode kedua SBY yang memilih wakil presiden di luar dari kader partai koalisi. Akan tetapi, kasus ini berbeda dengan situasi Jokowi periode kedua, pergerakan kelompok Islam di Indonesia semakin meningkat setelah Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017, sehingga kelompok Islam cenderung mendukung agenda sosial politik tertentu<sup>30</sup>. Dengan demikian, pemilihan wakil presiden harus mempertimbangkan figur yang mewakili kelompok Islam. Perpaduan antara Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah kombinasi antara kelompok nasionalis dan religius<sup>31</sup>. Munculnya nama Ma'ruf tidak terlepas dari peran PKB dan PPP dalam mempengaruhi keputusan Jokowi, sehingga mereka mendapatkan posisi wakil presiden.

Berbeda halnya dengan Koalisi Indonesia Kerja, partai Islam pada Koalisi Adil Makmur, PAN dan PKS kehilangan daya tawar politiknya. Pada Pemilihan Presiden tahun 2014, PAN dapat memaksimalkan momentumnya untuk bisa mendapatkan posisi calon wakil presiden.

Akan tetapi pada Pemilihan Presiden tahun 2019, Gerindra mendominasi koalisi, bahkan posisi calon wakil presiden pun diisi oleh Sandiaga Uno, kader Gerindra. Meskipun setelah dipilih menjadi calon wakil presiden, Sandiaga tidak lagi menjadi kader Gerindra. Akan tetapi, sosok Sandi saat itu lebih banyak dicitrakan sebagai seorang religius untuk melengkapi peran Prabowo yang dikenal nasionalis.

Pada akhirnya, Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Maruf memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2019. Kemudian, Gerindra pun memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju. Begitu pun dengan PAN yang bergabung kembali dengan kekuasaan, Tiga partai Islam dalam parlemen ada di dalam koalisi pemerintah, hanya PKS yang konsisten dengan posisinya sebagai oposisi pemerintah. Pemilu tahun 2019 berbeda dengan kondisi SBY tahun 2009 dimana seluruh partai Islam dalam parlemen mendukungnya untuk melanjutkan pemerintahan. Sedangkan Jokowi tidak memutuskan sendiri calon wakil presidennya, terjadi proses politik di antara partai koalisi, khususnya dalam menominasikan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi, dominasi tersebut justru muncul di kubu penantang petahana, Prabowo dan Gerindra lebih mendominasi proses nominasi kandidat.

Posisi partai Islam pada tahun 2019 secara electoral masing-masing memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda, PKB dengan suara paling tinggi dan PPP dengan suara paling rendah, PKS dan PAN bersaing ketat. Perbedaan ideologi dan kepentingan diantara partai Islam menjadi aspek fundamental dalam menentukan arah

<sup>29</sup> Ferdinan. (2016). Terbukti Korupsi Ibadah Haji, Suryadharma Ali Dihukum 6 Tahun Penjara. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-3115925/terbukti-korupsi-ibadah-haji-suryadharma-ali-dihukum-6-tahun-penjara> (Diakses: 8 Januari 2023).

<sup>30</sup> Mietzner, M., and Muhtadi, B. (2018). "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation", *Asian Studies Review*, 9 July 2018, 1-19.

<sup>31</sup> Riana & Hantor. (2018). Jokowi Ungkap Alasannya Pilih Maruf Amin Jadi Cawapres. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1115551/jokowi-ungkap-alasannya-pilih-maruf-amin-jadi-cawapres> (Diakses: 8 Januari 2023).

koalisi<sup>20</sup>. Selain itu, konflik internal dan minimnya figur politik yang dimiliki oleh partai Islam menyebabkan pengaruhnya dalam koalisi semakin menurun. Kemudian, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kursi partai di parlemen. Dengan demikian, peran dalam koalisi cenderung lebih didominasi oleh partai sekuler atau nasionalis, karena perolehan kursi yang lebih banyak dan elektabilitas kandidat yang lebih tinggi dari partai Islam.

Akan tetapi, dari kedua momentum pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, pola yang sama tetap muncul yaitu perpaduan antara nasionalis dan religius. Isu agama atau identitas Islam tidak hanya disematkan pada partai Islam, namun pola koalisi menggambarkan bahwa kandidat yang dinominasikan tetap harus menggambarkan perpaduan antara nasionalis dan religius. Meskipun secara perolehan kursi di parlemen, partai Islam kurang bisa bersaing dengan partai nasionalis, khususnya PDIP dan Gerindra, namun representasi Islam tetap menjadi kalkulasi politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Artinya, untuk menguatkan basis akar rumput dan meminimalisir konflik di antara masyarakat, maka seluruh partai politik, baik nasionalis maupun religius akan cenderung menempati posisi tengah, tidak pada ego sektoral masing-masing partai. Kondisi ini terbentuk karena aturan pemilu yang mengharuskan partai politik memenuhi ambang batas, serta syarat lebih dari lima puluh persen untuk bisa memenangkan kompetisi politik tersebut. Dengan demikian, pembelahan sosial cenderung dapat diminimalisir pada sistem ini, karena partai politik tidak bisa ada di sisi ekstrim untuk memenangkan pemilu, mereka harus ke tengah untuk mendapatkan suara yang lebih banyak

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kenapa identitas Islam tidak lagi menjadi saluran utama bagi masyarakat Muslim Indonesia? Sistem Pemilihan Presiden Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum cenderung dapat dikategorikan sebagai sistem majoritarian karena mengharuskan kandidat atau pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan perolehan suara lebih dari 50% dalam memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden Indonesia. Hal ini berdampak pada reorientasi partai politik dalam menkonstruksikan pembelahan sosial yang ada di masyarakat. Isu Islam dan nasionalis menjadi lebih sempit sehingga partai politik cenderung berorientasi ke tengah atau bersifat pragmatis. Hal ini dapat dibuktikan dengan dinamika pola koalisi yang terbentuk pada Partai Islam. Mereka tidak membentuk suatu kesatuan untuk mempertegas identitas Islam atau pembelahan sosial sebagai suatu kekuatan besar, namun mereka mencoba memadukan unsur Nasionalis dan Religius dalam menominasikan kandidat.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2014, PAN dapat berperan lebih baik dengan mencalonkan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden, sedangkan PKS dan PPP cenderung mengikuti proses politik yang dipimpin oleh Gerindra dan PAN. Sedangkan PKB bergabung dengan koalisi PDIP dan lebih banyak memainkan perannya untuk menguatkan posisi JK sebagai calon wakil presiden. PKS, PPP, dan PKB tidak dapat berperan melebihi PDIP maupun Gerindra karena kekuatan parlemen mereka lebih lemah. Kemudian, pada Pemilihan Presiden tahun 2019, PKB dapat berperan lebih baik dengan memanfaatkan momentum politik Islam di Indonesia. Sedangkan, PAN dan PKS kehilangan daya tawar mereka dihadapan

<sup>20</sup> Suryani. (2021). The coalition of Islamic Political Parties in the 2014 Presidential Election: A Case Study of the Bargaining Position of PKS, PPP, PAN, and PKB in the Coalition. Dissertation: FISIP UI.

Gerindra untuk menempatkan kadernya pada posisi calon wakil presiden.

Selanjutnya, meskipun PPP ada dalam koalisi pemenang, namun mereka tidak banyak berperan karena konflik internal dan lemahnya kekuatan mereka di parlemen.

Berdasarkan perbandingan kajian pada pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, koalisi yang dipilih partai Islam di Indonesia berkaitan dengan aspek ideologis dan pragmatis. Poros PKB yang berbasis NU lebih menerima PPP dibandingkan dengan PKS. Selain itu juga, konsistensi PKS sebagai oposisi mencerminkan adanya aspek ideologis yang dipegang oleh elit PKS. Akan tetapi, dari pola yang terbentuk partai Islam di Indonesia dipengaruhi oleh sistem electoral yang mengharuskan mereka berkoalisi dengan partai lain, khususnya untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Selain itu, pola yang terbentuk menunjukkan bahwa partai Islam cenderung memiliki preferensi untuk memadukan aspek nasionalis dan religious, sehingga perilaku partai Islam lebih condong ke tengah daripada menegaskan identitasnya dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Kepentingan pragmatisnya adalah mereka harus ikut berkompetisi pada pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga partai Islam cenderung dipengaruhi hukum sistem majoritarian bahwa untuk mendapatkan suara pemilih maka partai harus semakin ke tengah.

Kemudian, saya menyarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan hipotesis alternatif agar bisa lebih komprehensif dalam menjelaskan kaitan sistem electoral dan koalisi partai politik. Selain itu, secara metodologis penelitian lainnya bisa dilengkapi data dengan mewawancarai partai politik dan penyelenggara pemilu agar bisa menghasilkan argumentasi yang lebih mendalam. Selain itu, penggunaan mix method juga menjadi opsi tambahan, karena studi electoral berkaitan dengan perilaku manusia yang juga dapat diuji melalui pendekatan kuantitatif.

Selanjutnya, secara praktis, saya menyarankan penguatan nilai-nilai kebangsaan oleh penyelenggara negara untuk mendukung persatuan bangsa dan peningkatan literasi politik masyarakat dalam menghadapi pembelahan sosial pada kontestasi di tingkat eksekutif maupun legislatif.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Pada bagian ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Prof. Greg Fealy, seorang Indonesianis yang telah lama meneliti politik Indonesia. Terimakasih, atas bimbingan Pa Greg selama perkuliahan Religion, Democracy, and Development di UII. Terimakasih juga untuk Pa Djayadi Hanan, Ph.D, pembimbing akademik saya, atas jasa beliau saya bisa meningkatkan pemahaman saya mengenai kompetisi politik electoral di Indonesia, khususnya dalam melengkapi kekurangan dalam tulisan ini, meskipun sebenarnya tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena mereka lah Saya bisa menyelesaikan tulisan ini untuk kemudian bisa dipublikasikan oleh Jurnal Keadilan Pemilu dan direfleksikan oleh pembaca sekalian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayyubi, S., & Zuhri, S. (2014). *Pilpres 2014: Alasan PKB Koalisi dengan PDIP & Nasdem Usung Jokowi*. Tersedia di: <https://kabar24.bisnis.com/read/20140510/355/226692/pilpres-2014-alasan-pkb-koalisi-dengan-pdip-nasdem-usung-jokowi> (Diakses: 28 Desember 2022).
- Asril, S. (2014). *PPP Resmi Dukung Prabowo pada Pilpres*. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/12/0218266/PPP.Resmi.Dukung.Prabowo.pada.Pilpres> (Diakses: 28 Desember 2022).
- Baswedan, A R. (2004). Political Islam in Indonesia: Present and Future Trends, *Asian Survey*, vol. XLIV, no. 5, pp. 669-690.
- Beach, Derek., and Pedersen, Rasmus Brun. (2013). *Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines*. the University of Michigan Press: Michigan.
- Bland, B. (2019). *Politics in Indonesia: Resilient Elections, Defective Democracy*. Sydney: Lowy Institute for International Policy.
- Bloch, F., and Rottier, S. (2002). "Agenda control in coalition formation", *Social Choice and Welfare*, Vol. 19, No. 4, pp. 769-788.
- Caplow, T. (1956). "A Theory of Coalitions in the Triad", *American Sociological Review*, Vol. 21, No. 4, pp. 489-493.
- Corbin, J., and Strauss, A. (2014). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 4 ed. 2014. London: Sage Publication.
- Cox, Gary W. (1990). Centripetal and Centrifugal Incentives in Electoral Systems, *Midwest Political Science Association*, 34(4), 903-935.
- Epley, J., and Jung, E. (2016). "Vertically Disconnected: The Politics of Islam in Democratic Indonesia", *Asian Journal of Social Science*, Vol. 44, No. 1/2, pp. 54-77.
- Farisa, F C., Wiwoho, L H. (2019). *Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024*. Tersedia di: <https://pemilu.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024> (Diakses: 28 Desember 2022).
- Ferdinan. (2016). *Terbukti Korupsi Ibadah Haji, Suryadharma Ali Dihukum 6 Tahun Penjara*. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-3115925/terbukti-korupsi-ibadah-haji-suryadharma-ali-dihukum-6-tahun-penjara> (Diakses: 8 Januari 2023).
- Fiansyah, R. (2014). *PAN Resmi Dukung Prabowo sebagai Capres*. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/1506461/PAN.Resmi.Dukung.Prabowo.sebagai.Capres> (Diakses: 28 Desember 2022).
- Fiansyah, R., & Wedhaswary, I D. (2014). *Cerita Kiai PKB Putuskan Dukung Jokowi*. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/1835468/Cerita.Kiai.PKB.Putuskan.Dukung.Jokowi> (Diakses: 28 Desember 2022).
- Fossati, D. (2019). "The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 31, No. 2, pp.119-148.
- Kusnandar, V B., & Bayu, D J. (2021). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia*. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia> (Diakses: 28 Desember 2022).
- Mietzner, M. (2007). "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29, No. 2, pp. 238-263.
- Mietzner, M., and Muhtadi, B. (2018). "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation", *Asian Studies Review*, 9 July 2018, 1-19.

- Mujani, S., and Liddle, R W. (2009). "Muslim Indonesia's Secular Democracy", *University of California Press*, Vol. 49, No. 4, pp. 575-590.
- Norris, Pippa. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Electoral Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Purnomo, W A., & Susanto, E. (2014). *Kenapa PKB Ngotot Ajukan Muhaimin Jadi Cawapres Jokowi?*. Tersedia di: <https://pemilu.tempo.co/amp/570685/kenapa-pkb-ngotot-ajukan-muhaimin-jadi-cawapres-jokowi> (Diakses: 28 Desember 2022).
- Riana & Hantor. (2018). *Jokowi Ungkap Alasannya Pilih Maruf Amin Jadi Cawapres*. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1115551/jokowi-ungkap-alasannya-pilih-maruf-amin-jadi-cawapres> (Diakses: 8 Januari 2023).
- Sumedi, D P., & Kurniawati, E. (2014). *Kaukus PKB Batal Usung Jusuf Kalla Menjadi Capres*. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/570912/kaukus-pkb-batal-usung-jusuf-kalla-menjadi-capres> (Diakses: 28 December 2022).
- Suryani. (2021). *The coalition of Islamic Political Parties in the 2014 Presidential Election: A Case Study of the Bargaining Position of PKS, PPP, PAN, and PKB in the Coalition*. Dissertation: FISIP UI
- Tanuwidjaja, S. (2010). "Political Islam and Islamic parties in Indonesia: Critically assessing the evidence of Islam's political decline", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 32, No. 1, pp. 29-49.
- Ufen, A. (2008). "From "aliran" to dealignment: political parties in post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 16, No. 1, pp. 5-41.
- Wibowo, E A. (2014). *Ini Perolehan Kursi Resmi Parpol Pemilu 2014*. Tersedia di: <https://www.merdeka.com/politik/ini-perolehan-kursi-resmi-parpol-pemilu-2014.html> (Diakses: 28 Desember 2022).

**Alamat Korespondensi:**

Mohammad Fazrulzaman Azmi, Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik, Universitas Islam Internasional Indonesia, Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat, 16416, [mohammad.fazrulzaman@uiii.ac.id](mailto:mohammad.fazrulzaman@uiii.ac.id)